

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN ANGGARAN 2018-2022 MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Dylla Sukma Yennita¹, Nini Sumarni²

Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi

Email : sukmeyenyadylla@gmail.com, nsumarni@gmail.com

Abstract

This research aims to analyze the Financial Performance of the Regional Government of Agam Regency for the 2018-2022 Fiscal Year when viewed based on: (1) Fiscal Decentralization Degree Ratio, (2) Regional Financial Independence Ratio, (3) PAD Utilization Ratio, (4) Efficiency Ratio Regional Finance, (5) Harmony Ratio. This research is quantitative descriptive research carried out at the Regional Finance and Heritage Agency of Agam Regency. This research uses documentation to collect information. Using quantitative descriptive information analysis methods with the formula for Degree of Fiscal Decentralization Ratio, Regional Financial Independence Ratio, PAD Effectiveness Ratio, Regional Financial Efficiency Ratio, and Harmony Ratio.

The research results show that the financial performance of the Agam Regency regional government is not good. This can be seen in the results of the analysis (1) The ratio of the degree of fiscal decentralization is categorized as very low with a percentage of <15%. (2) The ratio of regional financial independence has an instructive relationship pattern because it is categorized as very low with an interval of <15%. This is because the role of the central government still dominates. (3) The PAD efficiency ratio is within the criteria of being quite efficient with criteria of 90% - 99%. (4) The regional financial efficiency ratio is quite effective with an average of 92.30%. (5) The harmony ratio based on surgical expenditure is considered good with an interval of 50% - 100% when compared to capital expenditure with an interval of 0% - 50%, so it can be said that regional governments are still not paying attention to regional development.

Keywords: *Regional Financial Performance, Degree of Fiscal Decentralization Ratio, Regional Financial Independence Ratio, PAD Effectiveness Ratio, Regional Financial Efficiency Ratio, Harmony Rati*

Abstrak

Riset ini bertujuan buat menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2018- 2022 bila dilihat bersumber pada:(1) Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal,(2) Rasio

Kemandirian Keuangan Daerah,(3) Rasio Daya guna PAD,(4) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah,(5) Rasio Keserasian. Riset ini ialah riset deskriptif kuantitatif yang dilaksanakan di Tubuh Keuangan serta Peninggalan Daerah Kabupaten Agam. Riset ini memakai dokumentasi buat mengumpulkan informasi. Memakai deskriptif kuantitatif pada metode analisis informasi dengan rumus Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, serta Rasio Keserasian.

Hasil riset menampilkan kalau kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Agam belum baik. Ini nampak pada hasil analisis(1) Rasio derajat desentralisasi fiskal dikategorikan sangat kurang dengan persentase < 15%. (2) Rasio kemandirian keuangan daerah mempunyai pola ikatan instruktif sebab dikategorikan sangat rendah dengan interval < 15%. Ini diakibatkan peranan pemerintah pusat masih mendominasi.(3) Rasio daya guna PAD terletak dalam kriteria lumayan efisien dengan kriteria 90%- 99%.(4) Rasio efisiensi keuangan wilayah terbilang lumayan efektif dengan rata- rata 92, 30%.(5) Rasio keserasian bersumber pada belanja pembedahan terbilang baik dengan interval 50%- 100% bila dibanding dengan belanja modal dengan interval 0%- 50% sehingga bisa dikatakan pemerintah daerah masih kurang dalam mencermati pembangunan daerah.

Kata Kunci : Kinerja Keuangan Wilayah, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan Wilayah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Wilayah, Rasio Keserasian

PENDAHULUAN

Selaku negara kesatuan, Indonesia mempraktikkan sistem otonomi wilayah dengan membagi wilayahnya jadi wilayah-wilayah yang terdiri dari provinsi, kabupaten, serta kota. Wilayah-wilayah ini memiliki ikatan dekat dengan pemerintah pusat. Otonomi yang diserahkan ke kabupaten serta kota dicapai dengan membagikan kekuasaan yang relatif kokoh pragmatis, serta akuntabel kepada pemerintah wilayah.

Suatu wilayah dapat dikatakan dapat mencapai otonomi apabila mempunyai kekuatan finansial. Artinya, wilayah memiliki kekuatan dan kapasitas untuk menelusuri sumber daya keuangan serta mengelola dan memanfaatkan dananya sendiri agar dapat mendanai operasional pemerintahan secara memadai. Selain itu, ketergantungan pada dukungan pusat akan diminimalkan, sehingga menjadikan sumber keuangan pemerintah wilayah sendiri sebagai sumber pendapatan terbesar dan meningkatkan peran pemerintah wilayah. Untuk mencapai otonomi wilayah, pemerintah wilayah tiap tahunnya harus menyusun anggaran yang diterima dan dikeluarkannya dalam setahun. Perencanaan pemasukan dan pengeluaran dimasukkan dalam APBD.

Faktor keuangan sangat penting dalam seluruh kegiatan pemerintahan karena hanya sedikit kegiatan pemerintah yang tidak melibatkan biaya. Semakin banyak uang yang tersedia, semakin banyak aktivitas dan tugas yang dapat dilakukan. Demikian pula, semakin baik pemerintahannya, semakin efisien pula penggunaan uangnya. Mengukur kinerja dalam pengelolaan keuangan sangat penting guna menilai akuntabilitas organisasi dan pengelola layanan publik, untuk menunjukkan bahwa anggaran umum digunakan secara tepat dan berhasil.

Adapun cara yang dipakai guna mengkaji kinerja keuangan suatu wilayah adalah melakukan analisis rasio-rasio keuangan yang teridentifikasi dalam APBD. Indikator-indikator tersebut diantaranya rasio derjat desentralisasi fiskal, rasio kemandirian daerah, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi daerah, dan rasio keserasian.

Derajat desentralisasi fiskal mencerminkan proporsi sumbangan utilitas publik terhadap quantity pendapatan daerah. Jika kontribusinya terhadap PAD tinggi, maka

semakin pula keahlian pemerintah wilayah dalam melakukan desentralisasi. Kemandirian keuangan wilayah mengukur ketergantungan wilayah terhadap sumber pendanaan eksternal. Semakin besar kemandirian sesuatu wilayah maka semakin kecil pula ketergantungan wilayah tersebut terhadap pihak eksternal, yaitu pemerintah pusat. Rasio efektivitas PAD ialah keahlian pemerintah wilayah dalam menggapai pemasukan yang direncanakan serta menyamakan rencana dengan sasaran yang diresmikan bersumber pada kemampuan wilayah yang sesungguhnya. Rasio efisiensi keuangan wilayah ialah besarnya bayaran yang dikeluarkan untuk menciptakan pemasukan dibanding dengan pemasukan yang direalisasikan. Sebaliknya rasio keserasian mewakili gimana pemerintah wilayah memprioritaskan alokasi sumber energi yang maksimal buat operasional serta belanja modal.

Tiap wilayah memiliki kemampuan tertentu yang jadi sumber pemasukan bagi wilayah tersebut. Salah satunya yaitu Kabupaten Agam. Selaku perpanjangan tangan pemerintah pusat, pemerintah wilayah harus sanggup menaikkan kesejahteraan warga setempat. Salah satu tujuan penerapan otonomi wilayah yakni guna mengurangi ketergantungan wilayah terhadap sokongan pemerintah pusat sehingga terbentuk kemandirian wilayah. Kemandirian wilayah tercermin dari keahlian dalam pengelolaan PAD.

Berdasarkan data anggaran pendapatan Kabupaten Agam tahun anggaran 2018-2022 dapat dijelaskan bahwa dibandingkan dengan PAD dan pendapatan lain-lainnya yang saah, dana perimbangan yang mana anggaran yang berasal dari pemerintah pusat masih mendominasi. Artinya ketergantungan terhadap dana transfer masih tinggi. Selain itu, jumlah realisasi belanja yang terjadi belum mencapai target batas atas.

Sebagaimana yang diketahui, Kabupaten Agam menjadi satu diantara Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat yang cukup akan kapasitas sumber daya sehingga dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan asli wilayah. Namun hal ini belum tergali secara maksimal, sehingga PAD yang diterima masih rendah mengakibatkan kemandirian wilayah belum tercapai.

KAJIAN PUSTAKA

Otonomi Daerah

Bersumber pada UU RI. No. 32 Tahun 2004, otonomi daerah mencakup segala kebebasan dan tanggung wilayah otonom buat menagani urusan politik serta keperluan warga serasi dengan aturan perundang-undangan. Kedaulatan suatu wilayah pula ialah salah satu wujud proses desentralisasi.

Tujuan pemberian otonomi wilayah adalah untuk memperkuat potensi wilayah dengan meningkatkan kesejahteraan, pelayanan, kreativitas, perlindungan, keadilan, kesetaraan, peran serta masyarakat, dan keharmonisan nasional, yang alhasil akan meningkatkan kesejahteraan suatu bangsa. Otonomi wilayah diharapkan memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk terlibat dalam ekspansi melalui usaha-usaha yang mendorong partisipasi aktif masyarakat. Otonomi wilayah tidak dapat dipisahkan dari perimbangan fiskal antara pemerintah wilayah dan pusat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan alat pelaksanaan strategi fiskal yang merupakan salah satu jenis kebijakan ekonomi. Untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan, pendapatan administrasi dan pemerintah dikelola dengan menggunakan instrumen berupa APBN. Tujuan pembentukan APBN sebagai panduan pengeluaran dan penerimaan negara untuk melaksanakan aktifitas dan kebijakan pemerintah. Anggaran yang dipersiapkan dengan baik akan meningkatkan produksi, kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Sebagai bagian dari pelaksanaan

APBN, setiap tahun disusun rancangan APBN yang memenuhi kebutuhan pemerintah dan kemampuan pemungutan pendapatan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan serta Belanja Daerah (APBD) ialah rancangan kegiatan pemerintah, rata-rata dinyatakan secara kuantitatif dalam satuan moneter, yang menggambarkan sumber pemasukan serta belanja wilayah buat mendanai aktivitas serta proyek wilayah selama setahun. Pada hakikatnya, APBD ialah alat buat tingkatkan pelayanan publik serta kesejahteraan warga sejalan dengan tujuan penyelenggaraan pemerintahan wilayah yang inklusif serta benar-benar bertanggung jawab. Oleh sebab itu, APBD wajib benar-benar mencerminkan kebutuhan warga setempat, dengan mencermati kemampuan keberagaman lokal.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Bagi PP. No. 71 Tahun 2010, laporan keuangan yakni informasi tersusun menimpa letak finansial serta transaksi yang dicoba oleh sesuatu industri pelapor. Penyampaian laporan keuangan daerah bisa dimaksud selaku wujud pertanggungjawaban pengelolaan keuangan nasional ataupun daerah terhadap kondisi keuangan serta transaksi yang dicoba. Tujuan pelaporan keuangan kota merupakan buat menyajikan kinerja keuangan entitas pelapor buat menolong pemakai dalam mengerjakan serta menilai keputusan bagian sumber energi.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja keuangan wilayah ialah derajat perolehanhasil operasional dibidang finansial, tercantum pemasukan serta belanja wilayah bersumber pada penanda keuangan bersumber pada syarat peraturan perundang-undangan sepanjang periode anggaran. Berdasarkan pendapat Halim, alat pengukuran buat menganalisis kinerja keuangan wilayah antara lain alat pengukuran rasio keuangan yang dimasukkan dalam APBD. Derajat desentralisasi fiskal menunjukkan pertimbangan besaran PAD daritotal pendapatan wilayah. Menurut Halim, kemandirian keuangan wilayah mengacu pada kemampuan pemerintah wilayah untuk membiayai dan mengatur pemerintahan wilayah dan kegiatan pembangunan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat lokal. Rasio efisiensi keuangan wilayah menyamakan tingkatan bayaran yang dikeluarkan buat menciptakan pemasukan yang dihasilkan. Tingkatan daya guna PAD menampilkan keahlian pemerintah wilayah dalam memobilisasi PAD buat menggapai tujuannya. Kebalikannya rasio keserasian mencerminkan gimana pemerintah wilayah memprioritaskan alokasi dana buat belanja sehari-hari serta pembangunan. Terdapat 2 metode buat menghitung rasio ini: rasio bayaran operasional serta rasio belanja modal.

Pandangan Ekonomi Islam tentang Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pelayanan keuangan dlam Islam harus diberikan dengan inisiatif, kreativitas, keadilan dan integritas. Mengukur kinerja keuangan termasuk mencatat dengan baik seluruh transaksi yang dilaksanakan sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Hal ini disebutkan dalam QS Al-Baqarah: 182 dan penting untuk dicatat.

Konsep anggaran syariah dapat menggunakan konsep *Baitul Mal* dengan sistem anggaran berimbang atau sistem pengeluaran-pendapatan berimbang. Penganggaran pemerintah pada masa Nabi Muhammad SAW. dilakukan secara hati-hati, efektif dan efisien untuk memastikan anggaran negara tetap stabil jika terjadi perang. Islam menekankan bahwa kemakmuran suatu wilayah bergantung pada pengelolaan keuangan yang optimal yang memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan generasi yang berkelanjutan serta meningkatkan kebermanfaatan masyarakatnya, dan hal ini tidak berlebihan. Kebijakan penciptaan kesejahteraan, khususnya sektor keuangan, harus berfungsi secara optimal dan seimbang.

METODE PENELITIAN

Riset ini memakai pola deskriptif kuantitatif, dimana melaksanakan perhitungan berdasarkan data finansial yang diperoleh, dan menyelesaikan kasus berdasarkan tujuan penelitian. Bentuk data yang dipakai adalah data kuantitatif. Riset dilakukan di Badan Keuangan dan Aset Daerah dengan jangka waktu dari Bulan November sampai disahkan saat sidang munaqasah. Alat analisisnya meliputi desentralisasi fiskal, tingkat kemandirian daerah, tingkat efisiensi daerah, tingkat efektivitas PAD, rasio keserasian. Subyek penelitian ini adalah LKPD Kabupaten Agam yaitu LRA Kabupaten Agam tahun anggaran 2018-2022. Lebih spesifiknya, alat rasio yang dipakai dalam riset ini yaitu :

1. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Rasio derajat desentralisasi fiskal dicari berdasarkan persamaan berikut :

$$DDF = \frac{PAD_t}{TPD_t} \times 100\%$$

Adapun proporsi penghitungan rasio derajat desentralisasi fiskal beserta kriteria disajikan pada rincian berikut.

Tabel 3.1 Proporsi Perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Skala Perhitungan Derajat Desentralisasi Fiskal %	Kemampuan Keuangan Daerah
00,00 – 10,00	Sangat kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Cukup
30,01 – 40,00	Sedang
40,01 – 50,00	Baik
>50,00	Sangat baik

Sumber : Anita Wulandari (2001:22)

2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Jika menghitung rasio kemandirian wilayah dapat memakai persamaan :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan transfer}} \times 100\%$$

Adapun skala interval rasio kemandirian keuangan wilayah beserta dengan tingkat kemandiriannya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2 Tingkat rasio kemandirian keuangan daerah

Rasio Kemandirian	Tingkat Kemandirian
0%-25%	Sangat Rendah
25%-50%	Rendah
50%-75%	Sedang
75%-100%	Tinggi

Sumber : Suprpto, 2008:59

3. Rasio Efektivitas PAD

Rasio Efektivitas PAD ini dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

Adapun kriteria rasio efektivitas beserta dengan tingkat efektivitasnya adaa pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.3 TolakUkur Penilaian Efektivitas Keuangan Daerah

Rasio Efektivitas	Tingkat Efektivitas
> 100%	Sangat efektif
100%	Efektif
90 – 99%	Cukup efektif
75% – 89%	Kurang efektif
< 75%	Tidak efektif

4. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio efisiensi keuangan wilayah dapat dihitung dengan persamaan :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Adapun tolak ukur penilaian rasio efisiensi beserta dengan tingkat efisisensi dalam tabel berikut iini.

Tabel 4.4 Kriteria Penilaian Efisiensi Keuangan Dearah

Rasio Efisiensi	Tingkat Efisiensi
100% keatas	Tidak efisien
90% - 100%	Kurang efisien
80% - 90%	Cukup efisien
60% - 80%	Efisien
Kurang dari 60%	Sangat efisien

Sumber : Abdul Halim (2007:234)

5. Rasio Keserasian

Terdapat 2 cara yang bisa dipakai guna melakukan perhitungan analisis rasio keserasian yaitu rasio belanja operasi dan rasio belanaja modal.

a. Rasio Belanja Operasi dirumuskan sebagaai berikut :

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

b. Rasio Belanja Modal dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Dengan kriteria sebagai berikut :

Tidak Baik : 0% - 50%

Baik : 50% - 100%

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Rasio derajat desentralisasi fiskal menunjukkan tingkatan wewenang serta kewajiban yang diserahkan oleh penguasa inti kepada penguasa wilayah dalam melaksanakan pembangunan. Hasil rekapitulasi rasio derajat desentralisasi fiskal bisa dilihat pada lis berikut:

Tabel 4.1 Rekapitulasi Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Tahun 2018-2022

Tahun	PAD (dalam Juta Rupiah)	Total Pendapatan Wilayah (Dalam Juta Rupiah)	DDF (%)	Kemampuan Keuangan
2018	99.684	1.390.233	7,17%	Sangat Kurang
2019	123.659	1.511.712	8,18%	Sangat Kurang
2020	107.163	1.365.886	7,84%	Sangat Kurang
2021	129.155	1.141.505	11,31%	Kurang
2022	156.669	1.387.990	11,28%	Kurang

Sumber : LKPD Kabupaten Agam (data diolah)

Bersumber dari rincian di atas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2018 kinerja keuangan dari rasio derajat desentralisasi fiskal sebanyak 7,17%. Pada tahun 2019 naik menjadi 8,18%. Tahun 2020 kembali turun menjadi 7,84%. Tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 11,31%. Dan tahun 2022 mengalami penyusutan jadi 11,28%. Rata-rata kinerja keuangan berdasarkan rasio ini dapat dikatakan sangat rendah. Hal ini berarti pemerintah wilayah masih kurang dalam menjalankan wewenang dari pemerintah pusat. Jika dilihat dari rendahnya PAD terhadap total pendapatan wilayah yang mana dibawah 15% mengindikasikan bahwa pemerintah wilayah Kabupaten Agam belum mampu menjalankan otonomi wilayahnya secara maksimal. Selain itu juga rendahnya kemampuan wilayah dalam menggali potensi-potensi sumber daya yang bisa menjadi sumber pendapatan bagi wilayah tersebut. Diharapkan pemerintah wilayah dapat lebih bisa mengoptimalkan sumber pendapatan yang ada.

2. Rasio Kemandirian Keuangan Wilayah

Hasil rekapitulasi kinerja keuangan pada rasio kemandirian keuangan wilayah dapat pada rincian dibawah ini :

Tabel 4.2 Rekapitulasi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Agam Tahun 2018-2022

Tahun	PAD (dalam Juta Rupiah)	Pendapatan Transfer (dalam Juta Rupiah)	RKKD (%)	Tingkat Kemandirian
2018	99.684	1.230.671	8,09%	Sangat Rendah
2019	123.659	1.326.887	9,31%	Sangat Rendah
2020	107.163	1.190.878	8,99%	Sangat Rendah
2021	129.155	1.208.427	10,68%	Sangat Rendah
2022	156.669	1.230.039	12,73%	Sangat Rendah

Sumber : LKPD Kabupaten Agam (data diolah)

Berdasarkan tabel diatas kinerja keuangan pemerintah wilayah pada rasio kemandirian keuangan wilayah di tahun 2018 sebanyak 8,09%. Tahun 2019 naik menjadi 9,31%. Tahun 2020 kembali merosot menjadi 8,99%. Tahun 2021 meningkat menjadi 10,68%. Serta tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 12,73%. Kemampuan keuangan wilayah Kabupaten Agam jika dipantau dari rasio kemandirian keuangan wilayah rata-rata masih jauh dengan pola hubungan interaktif yang mana pemerintah wilayah masih bergantung terhadap pemerintah pusat. Ini dapat terlihat pada tingginya dana ektern. Selain itu, kurangnya pemanfaatan sumber daya alam dalam area pertanian, perikanan, pariwisata, perdagangan dan jasa yang mana nantinya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kemandirian wilayah dapat dilakukan dengan meningkatkan pendapatan lokal serta mendukung adanya pembangunan lokal. Pemerintah juga harus bisa menggali dan memanfaatkan sumber-sumber yang ada.

3. Rasio Efektivitas PAD

Hasil rekapitulasi rasio efektivitas PAD dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.3 Rekapitulasi Rasio Efektivitas PAD Kabupaten Agam Tahun 2018-2022

Tahun	Anggaran PAD (dalam Juta Rupiah)	Realisasi PAD (dalam Juta Rupiah)	REPAD (%)	Kriteria
2018	107.230	99.684	92,9%	Cukup Efektif
2019	120.731	123.659	102,4%	Sangat Efektif
2020	110.527	107.163	96,9%	Cukup Efektif
2021	117.299	129.155	110,1%	Sangat Efektif
2022	162.943	156.669	96,1%	Cukup Efektif

Sumber : LKPD Kabupaten Agam (data diolah)

Berdasarkan tabel perhitungan rasio efektivitas PAD diatas dapat dilihat bahwa ditahun 2018 sejumlah 92,9%. Tahun 2019 sejumlah 102,4%. Tahun 2020 sejumlah 96,9%. Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 110,1%. Tahun 2022 turun kembali menjadi 96,1%. Kinerja keuangan wilayah dari rasio efektivitas PAD terbilang cukup efektif. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja dalam mengumpulkan pendapatan wilayah cukup memadai. Namun masih terdapat beberapa kendala seperti rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak serta rendahnya kemampuan sumber daya manusia. Oleh karena itu, diharapkan adanya pemantauan dan evaluasi secara terus menerus guna memperbaiki potensi yang ada. Pemerintah juga menghimbau masyarakat agar membayar pajak atau melakukan pelaporan jumlah pungutan pajak.

4. Rasio Efisiensi Keuangan Wilayah

Rasio efisiensi keuangan daerah ialah banyaknya bayaran yang disalurkan buat menciptakan pemasukan dibanding dengan pemasukan yang sesungguhnya dihasilkan. Perhitungan kinerja keuangan bersumber pada penanda efisiensi keuangan daerah disajikan pada rincian dibawah.

Tabel 4.4 Rekapitulasi Rasio Efisiensi Keuangan Kabupaten Agam Tahun 2018-2022

Tahun	Realisasi Belanja (dalam Juta Rupiah)	Realisasi Pendapatan (dalam Juta Rupiah)	REKD (%)	Kriteria
2018	1.238.203	1.390.233	89,06%	Cukup Efisien
2019	1.344.275	1.511.712	88,92%	Cukup Efisien
2020	1.196.361	1.365.886	87,58%	Cukup Efisien
2021	1.208.754	1.141.505	105,89%	Tidak Efisien
2022	1.281.226	1.387.990	92,30%	Kurang Efisien

Sumber : LKPD Kabupaten Agam (data diolah)

Berdasarkan tabel di atas dijelaskan pada tahun 2018 rasio efisiensi keuangan wilayah sebesar 89,06%. Tahun 2019 sebesar 88,92%. Tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 87,58%. Tahun 2021 meningkat menjadi 105,89%. Dan tahun 2022 merosot sebesar 92,30%. Kinerja keuangan pemerintah wilayah berdasarkan rasio efisiensi keuangan wilayah terbilang cukup efisien. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan wilayah telah mencapai tingkat yang memadai terutama dalam pemungutan sumber pendapatannya dapat terlihat realisasi pendapatan wilayah lebih besar dibandingkan biaya yang dikeluarkan dalam melakukan pemungutan. Namun pada tahun 2021, terbilang belum efisien dikarenakan realisasi belanja wilayah lebih besar dibandingkan dengan realisasi pendapatan. Jika rasio efisiensi tinggi, maka pemerintah wilayah belum mampu dalam meminimalisir pengeluaran wilayah dalam bentuk belanja wilayah. Oleh karena itu, diperlukan penyeimbangan antara belanja operasi dengan menekankan belanja modal.

5. Rasio Keserasian

Rasio keserasian memaparkan gimana penguasa wilayah dalam mengutamakan bagian finansialnya pada belanja operasi serta belanja modal. Hasil rekapitulasi rasio keserasian bisa dilihat pada rincian berikut ini:

**Tabel 4.5 Rekapitulasi Rasio Keserasian Kabupaten Agam Tahun 2018-2022
(Belanja Operasi)**

Tahun	Total Belanja (dalam Juta Rupiah)	Realisasi Belanja Operasi (dalam Juta Rupiah)	BO (%)
2018	1.238.203	1.022.581	82,5%
2019	1.344.275	1.062.156	79%
2020	1.196.361	1.023.189	85,5%
2021	1.208.754	1.058.552	87,5%
2022	1.281.226	1.111.767	86,7%

Sumber : LKPD Kabupaten Agam (data diolah)

Bersumber tabel diatas dapat diketahui bahwa tahun 2018 belanja operasi sebanyak 82,5%. Tahun 2019 sebesar 79%. Tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 85,5%. Tahun 2021 naik menjadi 87,5%. Dan tahun 2022 sebesar 86,7%. Kinerja keuangan pemerintah wilayah dilihat dari rasio keserasian belanja operasi terbilang cukup baik. Terlihat bahwa realisasi belanja operasi lebih kecil dibandingkan dengan total belanja wilayah. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran wilayah dialokasikan untuk kegiatan non-operasional seperti investasi atau proyek jangka panjang. Namun perlu adanya pengawasan terhadap komposisi belanja wilayah dan merencanakan pertumbuhan jangka panjang.

**Tabel 4.6 Rekapitulasi Rasio Keserasian Kabupaten Agam Tahun 2018-2022
(Belanja Modal)**

Tahun	Total Belanja (dalam Juta Rupiah)	Realisasi Belanja Modal (dalam Juta Rupiah)	BM (%)
2018	1.238.203	212.320	17,1%
2019	1.344.275	280.828	20,8%
2020	1.196.361	135.091	11,2%
2021	1.208.754	142.409	11,7%
2022	1.281.226	164.567	12,8%

Sumber : LKPD Kabupaten Agam (data diolah)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat kinerja keuangan wilayah Kabupaten Agam dilihat pada rasio keserasian belanja modal pada tahun 2018 sebesar 17,1%. Tahun 2019 naik menjadi 20,8%. Tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 11,2%. Tahun 2022 naik menjadi 12,8%. Dapat dijelaskan bahwa kinerja keuangan pemerintah wilayah berdasarkan rasio keserasian belanja modal terbilang belum baik. Hal ini terlihat jumlah realisasi belanja modal lebih sedikit dibandingkan dengan total belanja wilayah.

Pemerintah wilayah belum maksimal dalam melaksanakan pembangunan peralatan dan infrastruktur yang berguna bagi kemakmuran masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan temuan riset dan pembahasan dapat diambil kesimpulan bahwa kemampuan keuangan pemerintah wilayah di Kabupaten Agam secara umum dinilai kurang baik. Hal ini terlihat dari rendahnya rasio desentralisasi fiskal serta kemandirian fiskal wilayah. Ketergantungan pada pemerintah pusat masih tinggi, dan pemerintah wilayah belum mampu memaksimalkan otonominya. Pemerintah wilayah dapat menggali lebih jauh potensi sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Dari segi efektivitas PAD cukup efektif. Begitu pula dengan rasio efisiensi keuangan wilayah yang juga sangat efisien. Namun berdasarkan rasio keserasian tersebut dikatakan tidak stabil karena biaya operasional lebih tinggi dibandingkan investasi modal.

Saran

Pemerintah perlu menggali dan mengelola potensi wilayahnya untuk menciptakan sumber pendapatan baru dan mengoptimalkan sumber PAD yang ada untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang mandiri. Selain itu, pemerintah juga memaksimalkan sumber daya seperti pajak dan retribusi daerah, karena pajak dan retribusi daerah dijadikan salah satu faktor terpenting dan mempunyai dampak terbesar terhadap pengumpulan pendapatan daerah. Pemerintah juga harus bisa mengandalkan potensi lokal dan tidak bergantung pada pemerintah pusat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Nurul, 'Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Wilayah Dan Tingkat Kemandirian Wilayah Di Era Otonomi Wilayah: Studi Kasus Kabupaten Bengkalis', *Iqtishaduna*, 2015, 80–91
- Deswira, Anike, 'Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Wilayah: Studi Kasus Pada Pemerintah Wilayah Kabupaten Tanah Datar', *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 17.1 (2022), 72–88
- Fatkhul Mui, 'Otonomi Wilayah Dalam Perspektif Pembagian Urusan Pemerintah Wilayah Dan Keuangan Wilayah', 8.1 (2014)
- Habibi, 'Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Pada Institut Agama Islam Negeri Bone', *Adaara: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 11.2 (2021), 122–32
- Harahap, Heri Faisal, 'Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah', *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4.1 (2020), 34
- Jannah, Azizatul, and Tri Kurniawati, 'ANALISIS KAJIAN POTENSI EKONOMI WILAYAH KABUPATEN AGAM', *Jurnal Ecogen*, 1.2 (2018), 474–81
- Khaeruddin, Faizah, and Roby Aditiya, 'Evaluasi Implementasi Sistem Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah Wilayah', *Assets: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 10.2 (2020), 195–209
- Lamatenggo, Hamzah B. Uno dan Nina, *Teori Kinerja Dan Pengukurannya* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012)
- Mulyawan, Wawan, 'APBN Dan Pendapatan Nasional', *Salam (Islamic Economics*

- Journal*), 1.2 (2020)
- Nasution, Akmal Huda, and others, 'Otonomi Wilayah: Masalah Dan Penyelesaiannya Di Indonesia', *Jurnal Akuntansi (Media Riset Akuntansi & Keuangan)*, 4.2 (2016), 206–15
- Nelwan, Mosses, Dan Iis, and Siti Aisah, *Analisis Kinerja Keuangan Wilayah Tahun Anggaran 2011-2015 Di Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat*, 2017, XLIII
- Noviades, Dhils, 'Pengelolaan Keuangan Wilayah Di Era Otonomi Wilayah', *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 4.1 (2013), 43
- Rizki Sari Eka Putri, Agus Munandar, 'Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Wilayah Kota Malang Tahun Anggaran 2016-2020', 5.3 (2021)
- Rohmad, Miftakur, Fauzan Ramli, and others, 'Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Wilayah Kabupaten Tebo', *Al Itmamiy: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5.1 (2023), 17–35
- Saputra, Dori, 'Analisis Kemandirian Dan Efektivitas Keuangan Wilayah Pada Kabupaten Dan Kota Di Propinsi Sumatera Barat', *Jurnal Akuntansi*, 2.1 (2014)
- Sari, Imelda, Masagus Asaari, Ika Sefty, and Nurul Hidayah, *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Wilayah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010-2019*, 2010
- Setianingrum, Rizqi Dwi, and Haryanto Haryanto, 'Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Wilayah Kabupaten Dan Kota Provinsi Jawa Tengah', *Diponegoro Journal of Accounting*, 9.2 (2020)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016)
- Suparto, 'Otonomi Wilayah Di Indonesia: Pengertian, Konsep, Tujuan, Prinsip Dan Urgensinya', 1.3 (2017)
- Tobi, Maria Regina, and Farida Idayati, 'Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur', *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 5.8 (2016)
- Widodo, Slamet, and Dan Dahiri, *Analisis Pengaruh Belanja Negara Terhadap Inflasi Dan Pertumbuhan Ekonomi*, 2016
- Yuliasati, 'Urgensi Anggaran Pendapatan Belanja Wilayah (APBD) Terhadap Perencanaan Pembangunan Wilayah', *Katalogis*, 4.12 (2017)
- Zami, Alex, 'ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH WILAYAH', 3.2 (2020), 2615–3009
- Zuhri, Muhamad, and Ahmad Soleh, 'Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Wilayah Kabupaten Kaur', *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 4.2 (2016)